

2024-2026



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS**

**RENSTRA
BAPPEDA KABUPATEN KUDUS
Tahun 2024-2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	53
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	53
3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	69
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	69
4.2 <i>Cascading</i> Kinerja Perangkat Daerah.....	71
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	73
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN.....	75

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	89
	7.1 Rumusan IKU Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target.....	89
	7.2 Rumusan IKK Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target.....	89
BAB VIII	PENUTUP.....	92
	8.1 Catatan Penting.....	92
	8.2 Kaidah Pelaksanaan	92
	8.3 Rencana Tindak Lanjut.....	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kudus.....	15
Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023	24
Tabel 2.3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023	24
Tabel 2.4 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023.....	25
Tabel 2.5 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023.....	25
Tabel 2.6 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Distribusi Unit Kerja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023	26
Tabel 2.7 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023.....	26
Tabel 2.8 : Sarana dan Prasarana Ruangan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023.....	27
Tabel 2.9 : Sarana Mobilitas Operasional Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023.....	27
Tabel 2.10 : Sarana Perkantoran Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023.....	27
Tabel 2.11 : Sarana Mebelair Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023.....	28
Tabel 2.12 : Target Kinerja Bappeda Tahun 2019-2022.....	30
Tabel 2.13 : Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	31
Tabel 2.14 : Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022..	32
Tabel 2.15 : Perkembangan Capaian Indeks Inovasi Daerah.....	33
Tabel 2.16 : Tema Prioritas Kelitbangan Berdasarkan Rencana Induk Kelitbangan & Hasil Kelitbangan Tahun 2018-2022.....	34
Tabel 2.17 : Data Pemenang Kreasi dan Inovasi yang difasilitasi	34
Tabel 2.18 : Target dan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 Tingkat Sasaran	36
Tabel 2.19 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023 Tingkat Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	37
Tabel 3.1 : Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	55

Tabel 3.2	: Kesesuaian Visi Kementerian dengan Tupoksi Perangkat Daerah.....	57
Tabel 3.3	: Telaahan Kesesuaian Tupoksi Perangkat Daerah dengan Misi Renstra Provinsi.....	61
Tabel 3.4	: Keterkaitan Isu Strategis Internasional, Nasional, Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus .	66
Tabel 3.5	: Keterkaitan Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026 dengan Isu Strategis Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2026.....	68
Tabel 4.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda	70
Tabel 4.2	: Cascading Kinerja Perangkat Daerah	71
Tabel 5.1	: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	73
Tabel 6.1	: Perumusan Program Prioritas Pembangunan Daerah..	75
Tabel 6.2	: Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026	77
Tabel 7.1	: Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	89
Tabel 7.2	: Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	90

KATA PENGANTAR

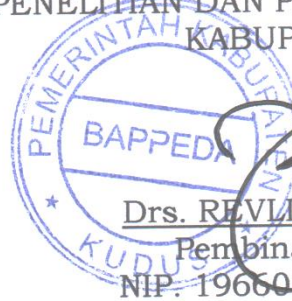
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dapat terselesaikan. Renstra ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan Staf Bappeda Kabupaten Kudus harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Bappeda Kabupaten Kudus.

Kudus, 11 April 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS



Drs. REVLISANTO SUBEKTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660321 198603 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (selanjutnya disebut Renstra Bappeda) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Bappeda merupakan penjabaran kinerja urusan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, yang disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra Bappeda ini.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193).
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 69);

21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 ini adalah untuk menyediakan pedoman perencanaan bagi Perangkat Daerah yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Daerah RPD Tahun 2024-2026 pada masa transisi akhir masa jabatan Bupati Kudus, sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2030.

Tujuan ditetapkannya Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ke dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.
3. Menjadikan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dasar operasional penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
4. Menjadikan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.2 Telaahan Renstra Kementerian, Renstra Provinsi dengan Kabupaten

3.1.2.1 Telaahan Renstra Kementerian

3.1.2.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.1.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Rumusan IKU Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target

7.2 Rumusan IKK Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target

BAB VIII : PENUTUP

8.1 Catatan Penting

8.2 Kaidah Pelaksanaan

8.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Bappeda berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Bappeda berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangannya, tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Bappeda dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kepala Badan

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. penetapan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - e. pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - f. penyelenggaraan administrasi Badan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

1. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup Badan.
3. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Badan;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan;

- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Badan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Badan;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan sesuai dengan kewenangannya;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan.
 5. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
 6. Dalam melaksanakan fungsi Sekretariat, Sekretaris dibantu Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

1. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang dipimpin oleh Kepala Bidang, merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
2. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan.
3. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rancangan rencana pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. pengoordinasian dan penyusunan usulan program dan kegiatan, rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - e. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengolahan data, informasi dan evaluasi pembangunan;
 - f. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah;
 - g. analisa data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - h. penyelenggaraan fasilitasi sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - i. pemantauan dan analisa hasil pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - j. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi pengendalian terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan Daerah;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan dibantu oleh Subkoordinator Perencanaan Pembangunan, Subkoordinator Evaluasi Pembangunan, dan Subkoordinator Data dan Informasi Pembangunan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

1. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang dipimpin oleh Kepala Bidang, merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
2. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
3. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis rencana pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - b. pengoordinasian bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - c. pengoordinasian bahan penyusunan rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - d. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - e. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan pada Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dibantu oleh Subkoordinator Pemerintahan, dan Subkoordinator Sosial Budaya, yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dipimpin oleh Kepala Bidang, merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
2. Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.
3. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis rencana pembangunan Daerah di bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
 - b. pengoordinasian bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan Daerah meliputi Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian bahan penyusunan rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah di bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
 - d. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan di bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
 - e. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan pada Perangkat Daerah di bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Subkoordinator Prasarana Wilayah, dan Subkoordinator Ekonomi, dan Subkoordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

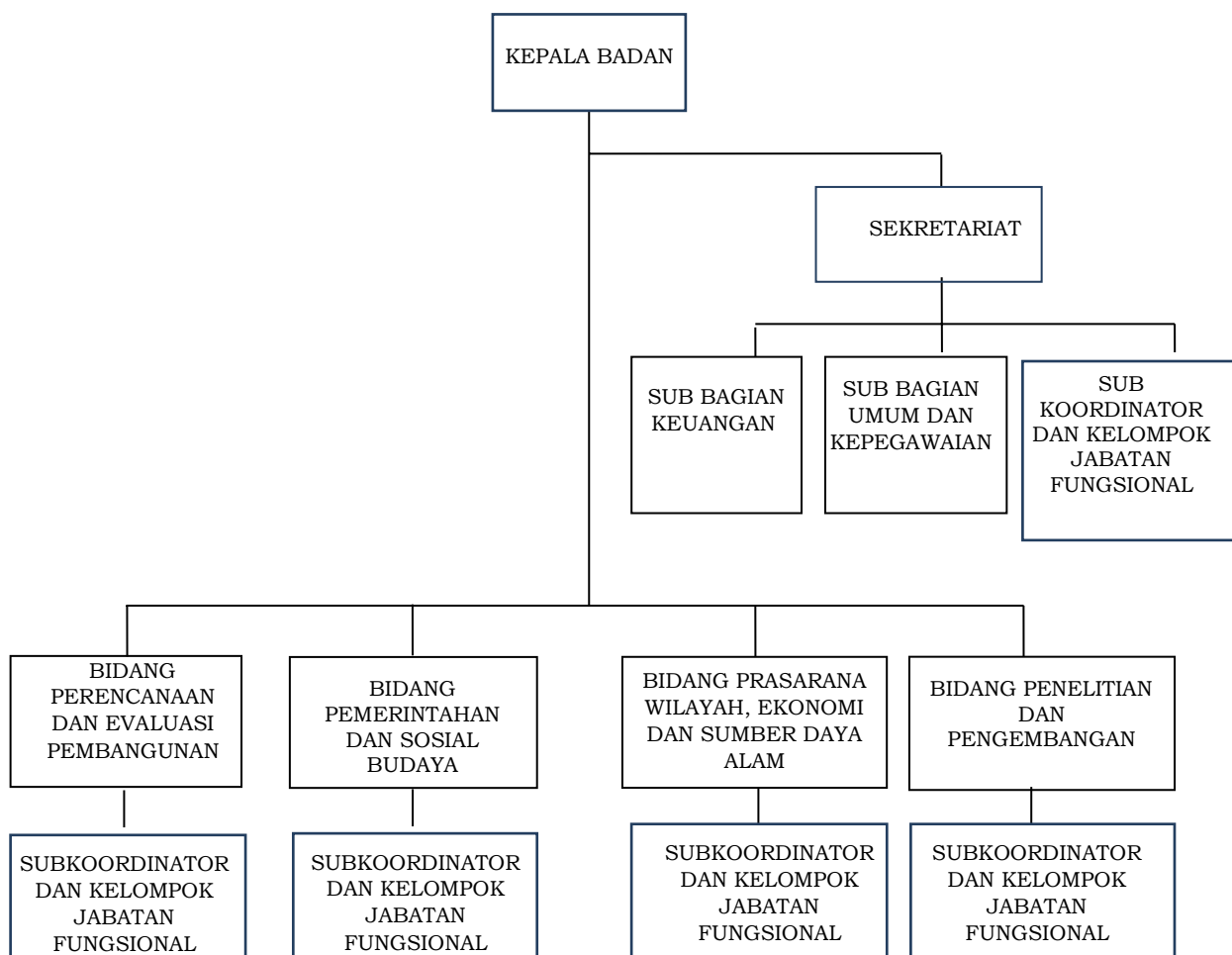
Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Bidang, merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan dan inovasi.
3. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan dan inovasi;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan dan inovasi;
 - c. pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian);
 - d. pengoordinasian pelaksanaan penguatan sistem inovasi Daerah;
 - e. pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi di Daerah;
 - g. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan penerapan perencanaan pembangunan Daerah;

- h. pembinaan teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan meliputi penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Subkoordinator Penelitian dan Pengkajian serta Subkoordinator Pengembangan dan Inovasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Kudus sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Ketersediaan Anggaran Perangkat Daerah

Anggaran pada Bappeda Kabupaten Kudus pada periode 2018-2023, mengalami fluktuasi yang signifikan khususnya pada tahun 2020-2021 dikarenakan kebijakan anggaran terhadap penanganan Pandemi Covid 19 seperti tersaji pada tabel 2.1.

Dari data tabel 2.1 tersebut menyajikan analisis data sebagai berikut:

1. Fluktuasi anggaran yang signifikan mengakibatkan instabilitas kemampuan anggaran pada situasi yang tidak menentu di masa pandemi Covid 19;
2. Dinamika klasifikasi dan kodefikasi alokasi anggaran yang menyebabkan muatan anggaran disajikan terbatas. Data anggaran tahun 2019-2020 menggunakan nomenklatur kegiatan yang berbeda dengan muatan belanja yang berbeda terhadap anggaran tahun 2021-2022;
3. Data analisis pertumbuhan anggaran dan realisasi belum dapat digunakan mengingat fluktuasi anggaran tersebut tidak normal sebagai dampak kebijakan *refocusing* anggaran terhadap penanganan Covid 19.

Data yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran 2024-2026 akan mengacu data tahun 2023 dimana kondisi sudah relatif stabil.

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kudus

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019 **	2020 **	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.809.735	8.915.182	6.623.437	6.723.903	7.701.755	7.258.054	5.847.984	6.384.769	7.752.813	**	93%	66%	96%	115%	**	1%	-3%
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	305.000	8.352	13.464	13.550	13.550	290.822	8.147	12.655	9.648	**	95%	98%	94%	71%	**	-9%	-50%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	152.500	4.176	6.702	7.000	7.000	145.411	4.000	6.225	5.399	**	95%	96%	93%	77%	**	-8%	-46%
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.500	4.176	6.762	6.550	6.550	145.411	4.147	6.430	4.348	**	95%	99%	95%	66%	**	-10%	-53%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.791.728	45.295.000	5.385.909	5.358.330	5.832.396	6.035.113	42.940	5.318.772	5.729.058	**	104%	0%	99%	107%	**	151%	12190%
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.556.645	5.325.441	5.318.771	5.283.330	5.757.396	5.668.510	5.042.156	5.251.636	5.679.048	**	102%	95%	99%	107%	**	1%	-4%
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	174.095	**	63.700	70.000	70.000	305.891	**	63.700	48.039	**	176%	**	100%	69%	**	5%	**

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019 **	2020 **	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.988	**	3.438	5.000	5.000	60.712	**	3.437	1.970	**	100%	**	100%	39%	**	23%	**
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**	**	100.150	80.000	580.000	**	**	88.685	67.991	**	**	**	89%	85%	**	302%	**
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**	**	24.300	30.000	30.000	**	**	15.460	20.850	**	**	**	64%	70%	**	12%	**
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.200	**	75.850	50.000	550.000	17.051	**	73.225	651.141	**	99%	**	97%	1302%	**	483%	**
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**	779.202.000	477.268	494.965	610.514	**	754.740	362.765	607.913	**	**	0%	76%	123%	**	-18%	**
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**	**	7.185	7.500	7.500	**	**	6.787	6.446	**			94%	86%	**	2%	**
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.950	**	152.198	200.204	230.314	13.350	**	137.965	350.890	**	96%		91%	175%	**	23%	**

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019 **	2020 **	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**	**	17.443	17.000	17.000	**	**	5.221	7.009	**			30%	41%	**	-1%	**
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.752	**	74.970	45.300	55.300	94.778	**	60.510	43.154	**	95%		81%	95%	**	-9%	**
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.980		17.333	14.000	17.000	23.979	**	9.756	12.774	**	100%		56%	91%	**	-33%	**
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000		8.400	8.400	8.400	1.349	**	7.200	6.840	**	67%		86%	81%	**	-33%	**
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.970		199.739	202.561	275.000	277.590	**	135.326	180.800	**	122%		68%	89%	**	-21%	**
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**	**	327.889	340.400	358.350	**	**	300.217	310.051	**			92%	91%	**	3%	**
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.600	**	54.000	75.000	92.950	18.421	**	48.732	50.143	**	28%		90%	67%	**	21%	**
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**	**	273.889	265.400	265.400	**	**	251.485	259.907	**			92%	98%	**	-1%	**
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.060	**	318.757	436.658	306.945	9.060	**	301.675	424.150	**	100%		95%	97%	**	2%	**

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019 **	2020 **	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	278.450	**	283.560	268.945	268.945	259.800	**	273.216	264.094	**	93%		96%	98%	**	-2%	**
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**	**	12.100	12.000	12.000	**	**	5.922	4.700	**			49%	39%	**	-1%	**
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**	**	5.250	135.920	6.000	**	**	4.864	131.680	**			93%	97%	**	2441%	**
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**	**	17.847	19.793	20.000	**	**	17.687	23.676	**			99%	120%	**	11%	**
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.105.700	1.593.219	1.190.466	1.717.422	3.001.843	2.019.425	1.562.481	991.251	2.317.934	**	96%	98%	83%	135%	**	17%	**
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.730.900	1.448.907	839.343	1.249.296	2.354.136	1.710.690	1.430.746	670.884	1.523.831	**	99%	99%	80%	122%	**	26%	**

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019 **	2020 **	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
5.01. 02.2. 01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	**	23.447	22.720	281.618	264.826	**	21.587	21.586	208.262	**		92%	95%	74%	**	377%	**
5.01. 02.2. 01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	**	**	66.185	131.354	119.623	**	**	63.335	43.613	**			96%	33%	**	45%	**
5.01. 02.2. 01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	**	**	49.085	113.184	600.000	**	**	35.061	70.055	**			71%	62%	**	280%	**
5.01. 02.2. 01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	**	**	600	7.500	10.000	**	**	600	2.220	**			100%	30%	**	592%	**
5.01. 02.2. 01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	**	**	700.753	715.640	1.359.687	**	**	550.303	1.199.680	**			79%	168%	**	46%	**
5.01. 02. 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	180.000	120.865	227.780	364.126	162.740	143.949	110.147	213.964	570.484	**	80%	91%	94%	157%	**	15%	126%

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019 **	2020 **	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
5.01.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	25.000	**	227.780	364.126	162.740	24.883	**	213.964	570.484	**	100%		94%	157%	**	0%	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	169.800	23.447	123.345	104.000	484.966	139.902	21.587	106.403	223.616	**	82%	92%	86%	215%	**	173%	345%
5.01.02.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	169.800	23.447	123.345	104.000	484.966		21.587	106.403	223.616	**	0%	92%	86%	215%	**	173%	**
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	576.313	202.334	203.585	314.400	806.400		198.029	196.214	298.981	**	0%	98%	96%	95%	**	37%	**
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	224.000	108.140	73.645	190.400	451.400	220.182	104.235	68.588	191.224	**	98%	96%	93%	100%	**	53%	-27%

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019 **	2020 **	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
5.01. 03.2. 01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(R PJPD, RPJMD dan RKPD)	69.000	84.490	31.180	34.000	115.000	68.477	80.807	29.206	30.695	**	99%	96%	94%	90%	**	52%	-44%
5.01. 03.2. 01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMDdan RKPD)	155.000	23.650	42.465	156.400	336.400	151.704		39.382	160.529	**	98%	0%	93%	103 %	**	95%	**
5.01. 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	352.313	94.194	68.360	74.000	220.000	327.698	93.794	68.070	65.711	**	93%	100%	100%	89%	**	26%	-100%
5.01. 03 2.02. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000	33.973	32.130	42.000	105.000	46.785	33.775	32.010	39.246	**	94%	99%	100%	93%	**	36%	-25%

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019 **	2020 **	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
5.01.03 2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dan LH (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	85.000	21.846	36.230	32.000	115.000	73.811	21.736	36.060	26.462	**	87%	99%	100%	83%	**	60%	-14%
5.01.03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	175.000	38.375	61.580	49.000	135.000	167.035	38.283	61.555	42.046	**	95%	100%	100%	86%	**	34%	-27%
5.01.03 2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	175.000	38.375	61.580	49.000	135.000	167.035	38.283	61.555	42.046	**	95%	100%	100%	86%	**	34%	-27%
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	500.000	128.490	218.112	237.900	531.600	461.685	126.045	215.621		**	92%	98%	99%	0%	**	32%	-35%
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**	**	**	97770	**	**	**	**	97.088	**				99%	**		**
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek aspek sosial	**	**	**	97770	**	**	**	**	97.088	**				99%	**		**

Kode	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019 **	2020 **	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	175.000	63.290	61.100	82.000	115.000	151.978	62.870	60.290	80.866	**	87%	99%	99%	99%	**	2%	-51%
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	175.000	63.290	61.100	82.000	115.000	151.978	62.870	60.290	80.866	**	87%	99%	99%	99%	**	2%	-51%
5.05.02.2.04	Pengembangan dan inovasi	325.000	65.200	157.012	156.900	416.600	309.706	63.175	155.331	143.339	**	95%	97%	99%	91%	**	57%	64%
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	325.000	65.200	157.012	156.900	416.600	309.706	63.175	155.331	143.339	**	95%	97%	99%	91%	**	57%	64%
	Dari Total anggaran/realisasi	10.017.703	8.082.333	8.235.602		11.509.998	9.924.180		7.789.855	10.691.022								

Keterangan : ** data tidak tersedia rinci. tidak dapat dianalisis

2.2.2 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) orang dan non aparatur sebanyak 9 (Sembilan) orang, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2 sampai dengan Tabel 2.7.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S2)	13
2.	Sarjana (S1)	23
3.	Diploma 3	1
4.	SMA/Sederajat	4
5.	SMP/Sederajat	1
	Jumlah	42

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1.	SD	-	-	0
2.	SMP/Sederajat	1	-	1
3.	SMA/Sederajat	2	2	4
4.	Diploma 3	1	-	1
5.	Sarjana (S1)	11	12	23
6.	Pasca Sarjana (S2)	7	6	13

Kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sumber daya aparatur cukup terbatas dan tidak sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam menyelenggarakan urusan perencanaan Kabupaten sekaligus urusan penelitian dan pengembangan. Sehingga diperlukan pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesional.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan I	-	-	-
2.	Golongan II	4	-	4
3.	Golongan III	10	6	16
4.	Golongan IV	6	7	13

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Bappeda Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa untuk golongan III (tiga) sebanyak 16 orang paling banyak dibandingkan dengan golongan IV (empat) sebanyak 13 orang. Sedangkan 9 orang lainnya merupakan pegawai non ASN (non golongan).

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO.	KEPANGKATAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Utama Muda	1
2.	Pembina Tk.I	1
3.	Pembina	11
4.	Penata Tk. I	9
5.	Penata	3
6.	Penata Muda Tk.I	1
7.	Penata Muda	3
8.	Pengatur Tk.I	2
9.	Pengatur	2
10.	Non PNS	9
	Jumlah	42

Jumlah pegawai berdasarkan distribusi unit kerja menunjukkan jumlah terbanyak berada di sekretariat disebabkan terdistribusi untuk 2 (dua) subbagian. Sedangkan pada bidang-bidang masih memerlukan pegawai fungsional sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta operasional kegiatan.

Tabel 2.6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Distribusi Unit Kerja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Bappeda	1
2.	Sekretariat	12
3.	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	11
4.	Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	7
5.	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	6
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	5

Jumlah pegawai berdasarkan eselon di Bappeda Kabupaten Kudus terbanyak berada di eselon III b yaitu sebanyak 4 orang dengan jabatan Kepala Bidang. Sedangkan eselon IV a sebanyak 2 orang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Sub Bagian Keuangan. Eseon III a dan II b masing-masing menjabat sebagai Sekretaris Badan dan Kepala Badan.

Tabel 2.7. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO.	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	II b	1
2.	III a	1
3.	III b	4
4.	IV a	2
	Jumlah	8

2.2.3 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 2.8 sampai dengan Tabel 2.11.

Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Ruangan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO.	RINCIAN	JUMLAH RUANG
1.	Ruang Kepala	1 unit
2.	Ruang Sekretariat	1 unit
3.	Ruang Bidang	4 unit
4.	Ruang Pertemuan	2 unit
5.	Ruang Arsip	1 unit
	Jumlah	9 unit

Tabel 2.9 Sarana Mobilitas Operasional Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO.	RINCIAN	JUMLAH
1.	Mobil	5 unit
2.	Sepeda Motor	24 unit

Tabel : 2.10 Sarana Perkantoran Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	GPS	2 unit
2.	Mesin Calculator	1 unit
3.	Alat Penghancur Kertas	2 unit
4.	White Board	2 unit
5.	White Board Elektronik	1 unit
6.	LCD Proyektor	4 unit
7.	Jam Elektronik	4 unit
8.	Lemari Es	1 unit
9.	AC Sentral	4 unit
10.	AC Split	12 unit
11.	Exhaust Fan	4 unit
12.	Televisi	5 unit
13.	Cassette Recorder	1 unit
14.	Amplifier	1 unit
15.	Dispenser	7 unit
16.	Handy Cam	4 unit

No.	Jenis Barang	Jumlah
17.	Mainframe	2 unit
18.	Komputer PC	5 unit
19.	Laptop	8 unit
20.	Notebook	44 unit
21.	Scanner	2 unit
22.	Printer	36 unit
23.	Wireless	6 unit
24.	UPS	1 unit
25.	Hardisk Eksternal	12 unit
26.	Server	2 unit
27.	Wireless Access Point	9 unit
28.	Kamera Elektronik	3 unit
29.	Tripod Camera	1 unit

Tabel 2.11 Sarana Mebelair Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	Lemari Besi	19 buah
2.	Rak Kayu	1 buah
3.	Filling Besi	22 buah
4.	Brankas	1 buah
5.	Kardek Besi	1 buah
6.	Rotary Filling	1 buah
7.	Lemari Kaca	15 buah
8.	Lemari Kayu	34 buah
9.	Meja Kayu	19 buah
10.	Meja Tambahan	1 buah
11.	Kursi Rapat	27 buah
12.	Kursi Tamu	10 buah
13.	Kursi Putar	15 buah
14.	Kursi Lipat	8 buah
15.	Meja Komputer	8 buah
16.	Sofa	1 buah
17.	Lambang Garuda Pancasila	2 buah
18.	Gambar Presiden / Wakil Presiden	2 buah
19.	Tangga Aluminium	1 buah
20.	Kaca Hias	3 buah

No.	Jenis Barang	Jumlah
21.	Alat Pemadam	2 buah
22.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 buah
23.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7 buah
24.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8 buah
25.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	27 buah
26.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 buah
27.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8 buah
28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	21 buah
29.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	18 buah
30.	Lemari buku untuk Perpustakaan	17 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Bappeda Kabupaten Kudus berperan penting dalam urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Bappeda Kabupaten Kudus merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Dokumen – dokumen tersebut menjadi acuan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bappeda menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian, dan pengembangan; pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam, penelitian dan pengembangan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan. Dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya yang dijabarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas pada Badan Daerah Kabupaten Kudus untuk pencapaian kinerja pelayanan selama lima Tahun (2013 – 2018), dapat dilihat dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Target Kinerja Bappeda Tahun 2019-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi pengukuran, Tipe perhitungan dan Sumber Data)	SATUAN	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase Capaian IKU Bupati	Formulasi pengukuran: Jumlah IKU Bupati yang tercapai dibagi jumlah total IKU Bupati dikali 100%	Persen	87	91	95	100	100*
		Tipe Perhitungan: Non Kumulatif						
		Sumber Data : Bappeda						
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Formulasi pengukuran: Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,5	72,5	75	81	83
		Tipe Perhitungan: Non Kumulatif						
		Sumber Data : Bappeda						
3. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	Formulasi pengukuran: Jumlah kegiatan utama penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dibagi Jumlah total kegiatan utama penelitian dan pengembangan dikali 100%	Persen	57	57	86	86	100
		Tipe Perhitungan: Non Kumulatif						
		Sumber Data : Bappeda						

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus.

Tabel tersebut menyajikan informasi target indikator kinerja pada Renstra Bappeda Kabupaten Kudus, meliputi indikator pertama; kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah dengan Persentase Capaian IKU Bupati, indikator kedua; akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, serta indikator ketiga; meningkatnya realisasi kualitas penelitian dan pengembangan daerah dari tahun 2019 s/d 2023.

Tabel 2. 13 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya RTRW yang ditetapkan PERDA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	93,40%	100%	100%	100%	100%
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100%
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	97,73	98,07	98,90	97,73	98,95

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023.

Ketersediaan dokumen perencanaan mulai jangka panjang, menengah, dan tahunan di Kabupaten Kudus telah lengkap sejak tahun 2018 hingga 2022. Namun, terdapat kinerja yang belum optimal dalam konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD di tahun 2018. Hal itu disebabkan karena dalam perkembangannya terdapat perubahan

regulasi yang signifikan yaitu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta turunannya yang mengatur adanya pemutakhiran program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kelitbangan turut memberikan andil bagi terciptanya inovasi yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan mendorong kebijakan daerah yang dihasilkan dari pemanfaatan hasil kelitbangan. Capaian indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat dalam tabel 2.14.

Tabel 2. 14 Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	29	43	57	72	72
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	NA	NA	100	100	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	NA	NA	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus.

Berdasarkan tabel di atas, persentase implementasi kegiatan kelitbangan yang diambil dari 7 (tujuh) kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan Kabupaten Kudus, setiap tahunnya mengalami kenaikan. Data Tahun 2022 menunjukkan 72%, artinya di antara 7 kegiatan

kelitbangan tersebut, masih ada 2 (dua) kegiatan kelitbangan yang belum dilaksanakan, yaitu perekayasaan dan pengoperasian.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan berupa produk dokumen kajian / penelitian telah dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Tabel 2. 15 Perkembangan Capaian Indeks Inovasi Daerah

NO	Hasil Penilaian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Skor	0	400	4.122	42,51	51,73
2	Kategori	tidak mengisi data	Kurang Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus.

Indeks Inovasi Daerah direncanakan sebagai salah satu penanda tingkat sasaran pada kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan. Selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana tabel diatas, perkembangan pencapaiannya fluktuatif, hal ini disebabkan karena indikator rancang bangun, sumberdaya manusia, kualitas inovasi, kecepatan inovasi dan kemanfaatan belum terpenuhi secara optimal.

Pada tabel 2.16 memperlihatkan bahwa hasil kelitbangan utamanya dokumen / kajian atas tema-tema pembangunan masih sangat kecil dibandingkan dengan rencana yang telah disusun dalam Dokumen Rencana Induk Kelitbangan. Faktor yang mempengaruhi ketercapaian yang sangat kecil ini antara lain masih kurangnya tindaklanjut atas jejaring kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan baik pemerintah maupun swasta, masih terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia bidang kelitbangan.

Tabel 2. 16 Tema Prioritas Kelitbangan Berdasarkan Rencana Induk Kelitbangan & Hasil Kelitbangan Tahun 2018-2022

NO	Tema	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Prioritas Kelitbangan							
1	Tatakelola Pemerintahan & Pelayanan Publik	Kajian	6	10	6	3	3
2	Ekonomi & Pembangunan Daerah	Kajian	12	11	9	5	3
3	Sosial & Kemasyarakatan	Kajian	5	5	5	4	2
4	Infrastruktur & Pengembangan Wilayah serta Kebencanaan	Kajian	7	10	5	9	5
5	Inovasi & Pengembangan Iptek	Kajian	5	5	5	4	4
	Jumlah	Kajian	35	42	30	25	17
Hasil Kelitbangan yang telah tersusun							
NO	Tema	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tatakelola Pemerintahan & Pelayanan Publik	Kajian	1	0	0	0	0
2	Ekonomi & Pembangunan Daerah	Kajian	0	1	0	1	1
3	Sosial & Kemasyarakatan	Kajian	0	0	1	0	1
4	Infrastruktur&Pengembangan Wilayah serta Kebencanaan	Kajian	0	0	0	0	0
5	Inovasi & Pengembangan Iptek	Kajian	0	1	0	0	0
	Jumlah	Kajian	1	2	1	1	2

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus

Tabel 2. 17 Data Pemenang Kreasi dan Inovasi yang difasilitasi

No	TEMA	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Agribisnis & Ketahanan Pangan	NA	2	1	1	0	4
2	Energi baru dan Terbarukan	NA	1	1	-	1	3
3	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	NA	-	-	-	2	2
4	Kesehatan, Obat-obatan dan Kosmetika	NA	1	1	3	3	8
5	Pendidikan	NA	-	-	1	2	3
6	Rekayasa Teknologi dan Manufaktur	NA	6	3	3	3	15
7	Kerajinan dan Industri rumah Tangga	NA	1	-	4	1	6
8	Sosial dan Budaya	NA	-	-	-	-	-
9	TIK	NA	1	-	-	-	1

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus.

Dari pemenang di atas, beberapa telah difasilitasi untuk mendapatkan HAKI (Hak kekayaan Atas Intelektual) dan Hak Paten. Diharapkan para inovator dan inventor selanjutnya dapat merasakan manfaat atas didapatkannya hak paten inovasinya yaitu terjamin perlindungan hukum atas karyanya, menambah kepercayaan konsumen, mengurangi plagiarisme, dan menghindari eksploitasi karya.




Pencapaian kinerja pembangunan daerah pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 dinyatakan dalam status sebagai berikut:

- untuk capaian kinerja terhadap target Renstra/RPJMD yang Tercapai Lebih Dari Atau Sama Dengan 100% ($\geq 100\%$).
- ▶ untuk capaian kinerja terhadap target Renstra/RPJMD yang Akan Tercapai ($50\% \leq 99\%$).
- ▼ untuk capaian kinerja terhadap target Renstra/RPJMD yang Perlu Upaya Keras ($< 50\%$).

Sedangkan rata-rata capaian kinerja dari capaian kinerja pembangunan daerah pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 dikategorikan dalam predikat kinerja, yaitu:

- Sangat Tinggi, untuk capaian kinerja di atas 91,00% sampai dengan 100,00% ($91,00\% \leq X < 100,00\%$).
- Tinggi, untuk capaian kinerja diatas 76,00% sampai dengan 90,00% ($76,00\% \leq X < 90,00\%$).
- Sedang, untuk capaian kinerja diatas 66,00% sampai dengan 75,00% ($66,00\% \leq X < 75,00\%$).
- Rendah, untuk capaian kinerja diatas 51,00% sampai dengan 65,00% ($51,00\% \leq X < 65,00\%$).
- Sangat Rendah, untuk capaian kinerja sama atau kurang dari 50,00% ($X \leq 50,00\%$).






Tabel 2.18 (T-C.23) Target dan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 Tingkat Sasaran






No	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Jenis Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Status / Predikat Kinerja
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023*	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah			Persentase capaian IKU Bupati	87%	91%	95%	100%	100%	73,91%	73,91%	100,12%	104,55%		84,95%	81,22%	105,39%	104,55%		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70,50	72,50	75	81	83	76	77	82	83		107,69%	106,47%	109,13%	102,47%		
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah			Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah	57%	57%	86%	86%	100%	57%	57%	86%	86%		100%	100%	100%	100%		
RATA- RATA CAPAIAN KINERJA IKU															97,55%	95,90%	104,84%	102,34%		Sangat Tinggi

Keterangan : ** Tahun 2023 Realisasi belum tersedia.





Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus.





Tabel 2.19 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023 Tingkat Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan






No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Jenis Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Status / Predikat Kinerja
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023*	
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
2				Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%		100%	100%		100%		
3				Persentase keterisian data dan informasi	45%	50%	55%	60%	65%	58,12%	58,43%	58,43%	60%		129,16%	116,86%	106,24%	100%		
4	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	7 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	7 dok	6 dok	6 dok	6 dok		100%	100%	100%	100%		
5	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			Jumlah Dokumen Renja OPD			2 dok	2 dok	2 dok			2 dok	2 dok				100%	100%		


No	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Jenis Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Status / Predikat Kinerja
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023*	
6	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah			1 kali	1 kali	1 kali			1 kali	1 kali				100%	100%		
7	Melaksanakan Musrenbang Kabupaten			Jumlah pelaksanaan musrenbang kabupaten			1 kali	1 kali	1 kali			1 kali	1 kali				100%	100%		
8	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			Jumlah dokumen bahan musrenbang kecamatan			1 dok	1 dok	1 dok			1 dok	1 dok				100%	100%		
9	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten			2 dok	2 dok	2 dok			2 dok	2 dok				100%	100%		
10	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pembangunan			Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan	2 dok	2 dok				2 dok	2 dok				100%	100%				







No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Jenis Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Status / Predikat Kinerja		
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023*			
11	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan			Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan			3 dok	3 dok	3 dok								100%	100%				
12	Kegiatan Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah			3dok	3 dok	3 dok			3 dok	3 dok				100%	100%				
13	Kegiatan Penyusunan profile daerah (BanGub)			Jumlah dokumen SIPD	1 dok					1 dok						100%						
14				Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 dok	3 dok				3 dok	3 dok					100%	100%					
15	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah			2 dok	2 dok	2 dok			2 dok	2 dok				100%	100%				





No	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Jenis Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Status / Predikat Kinerja
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023*	
16	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen evaluasi pembangunan			2 dok	2 dok	2 dok			2 dok	2 dok				2 dok	2 dok		
17	Program perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya			Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
18	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		100%	100%	100%	100%		
19	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		100%	100%	100%	100%		





No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Jenis Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Status / Predikat Kinerja	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023*		
20	Kegiatan Fasilitasi SDG's (BanGub)			Jumlah dokumen SDG's	1 dok					1 dok					100%						
21	Kegiatan Koordinasi penanggulangan kemiskinan (BanGub)			Jumlah dokumen laporan penanggulangan kemiskinan	1 dok					1 dok					100%						
22	Kegiatan Fasilitasi pengawasan peredaran garam tdk beryodium dlm rgka GAKY (BanGub)			Jumlah dokumen laporan pengawasan GAKY	1 dok					1 dok					100%						
23	Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam			Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		






No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Jenis Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Status / Predikat Kinerja
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023*	
24	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok		100%	100%	100%	100%		
25	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan ekonomi			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		100%	100%	100%	100%		
26	Kegiatan Fasilitasi FEDEP (BanGub)			Jumlah kluster yang terfasilitasi	8 kluster					8 kluster					100%					
27	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA & LH			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok		100%	100%	100%	100%		
28	Program Pelayanan administrasi umum			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	81,5	82	83	83	83	81,77	86	87,76	86		100,23%	104,88%	105,73%	105,73		






No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Jenis Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Status / Predikat Kinerja	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023*		
29	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tersedianya pedoman perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah			15 dok	15 dok	15 dok			15 dok	15 dok				100%	100%			
30	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja			Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	7 dok	6 dok	9 dok	9 dok	9 dok	7 dok	6 dok	9 dok	9 dok		100%	100%	100%	100%			
31	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart			6 dok	6 dok	6 dok			6 dok	6 dok				100%	100%			
32	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan PD			8 dok	8 dok	8 dok			8 dok	8 dok				100%	100%			
33	Pelayanan administrasi & pelaporan keuangan			Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	1 dok	1 dok				1 dok	1 dok	8 dok			100%	100%	100%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Jenis Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Status / Predikat Kinerja
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023*	
39	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur			38 dok	38 dok	38 dok			38 dok	38 dok				100%	100%		
40	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			7 jenis	7 jenis	7 jenis			7 jenis	7 jenis				100%	100%		
41	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			56 jenis	45 jenis	50 jenis			56 jenis	45 jenis				100%	100%		
42				Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga			15 jenis	8 jenis				15 jenis	8 jenis				100%	100%		
43				Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara		29 unit					31 unit					107%				
44	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah bahan logistic kantor			10 jenis	10 jenis	10 jenis			10 jenis	10 jenis				100%	100%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Jenis Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Status / Predikat Kinerja
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023*	
45	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah barang cetak dan penggandaan			5 jenis	5 jenis	5 jenis			5 jenis	5 jenis				100%	100%		
46	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			2 judul	2 judul	2 judul			2 judul	2 judul				100%	100%		
47	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah koordinasi dan konsultasi			60 kali	30 kali	80 kali			60 kali	30 kali				100%	100%		
48	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur			15 dok	15 dok	15 dok			15 dok	15 dok				100%	100%		

No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Jenis Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Status / Predikat Kinerja
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023*	
49	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			3 jenis	3 jenis	3 jenis				3 jenis	3 jenis			100%	100%		
50	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah PHD dan jasa tenaga administrasi		8 orang	8 orang	8 orang	8 orang		8 orang	8 orang	8 orang			100%	100%	100%		
51	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tersedianya pedoman pengelolaan sumber daya aparatur			15 dok	15 dok	15 dok				15 dok	15 dok			100%	100%		
52	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			30 unit	30 unit	30 unit				30 unit	30 unit			100%	100%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Jenis Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Status / Predikat Kinerja
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023*	
53	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan kerja yang dipelihara			17 unit	10 unit					17 unit	10 unit			100%	100%		
54	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung kantor yang terpelihara			1 unit	1 unit					1 unit	1 unit			100%	100%		
55	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Peralatan Gedung kantor yang terpelihara			5 unit	5 unit					5 unit	5 unit			100%	100%		
56	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			Capaian fasilitasi bidang penelitian dan pengembangan daerah	57%	57%	86%	86%	100%	57%	57%	86%	86%		100%	100%	100%	100%		
57	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			Tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengkajian daerah				1 dok	1 dok				1 dok					100%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Jenis Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					Status / Predikat Kinerja
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023*	
58	Penyusunan Penelitian dan Pengkajian			Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		100%	100%	100%	100%		
59	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			Tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengkajian daerah			1 dok	1 dok	1 dok			1 dok	1 dok				100%	100%		
60				Jumlah dokumen penelitian dan pengkajian			1 dok	1 dok	1 dok			1 dok	1 dok				100%	100%		
61	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			Tersedianya pedoman tahapan pengembangan dan inovasi daerah			1 dok	1 dok	1 dok			1 dok	1 dok				100%	100%		
62				Jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		100%	100%	100%	100%		
RATA- RATA CAPAIAN KINERJA																				Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 2.18 di atas, disimpulkan bahwa indikator kinerja pertama mempunyai persentase capaian yang fluktuatif antara tahun 2019 s/d 2022. Pada tahun 2020, persentase capaian mengalami penurunan sebesar 3,73% dibandingkan tahun 2019 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 24,17%, serta mencapai 104,55% pada tahun 2022. Hal tersebut juga berlaku pada indikator kinerja yang kedua, dimana persentase capaian berfluktuatif antara tahun 2019 s/d 2022, walaupun realisasinya mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, persentase capaian mengalami penurunan sebesar 1,22% dan realisasi mengalami kenaikan sebesar 1,27% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021, baik realisasi dan persentase capaian mengalami kenaikan sebesar 4,66 dan 2,66% dibandingkan tahun 2020. Sementara pada tahun 2022 realisasi mengalami kenaikan sebesar 1,15 sedangkan capaian mengalami penurunan sebesar 6,66%. Penurunan persentase pada indikator kinerja pertama dan dua, tahun 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang berimbas terhadap Kabupaten Kudus. Indikator ketiga, persentase capaian relatif stabil antara tahun 2019 s/d 2022 yaitu sebesar 100%. Secara keseluruhan rata-rata pencapaian indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 100%, termasuk terhadap capaian target akhir Renstra (Tahun 2023).

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi layanan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus berikut *stakeholder*-nya dan seluruh masyarakat Kabupaten Kudus yang tersebar di 9 Kecamatan, dan 132 desa/kelurahan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah, yakni berfungsi sebagai pengarah untuk memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Karenanya dengan perencanaan bisa menjadi dasar arah dan prioritas pembangunan dan pengembangan daerah dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus berusaha menjangkau seluruh komponen masyarakat dengan membuka akses

informasi dan komunikasi secara digital melalui aplikasi dan media sosial sehingga lebih terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ouput layanan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berupa fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, fasilitasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dokumen, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta hasil kajian penelitian/inovasi dan pengembangan daerah. Data, proses dan dokumen bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus mempunyai peran yang penting dan strategis.

Data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dengan data yang berperan sebagai informasi merupakan bahan untuk menetapkan arah kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Pemanfaatan data dan informasi perencanaan oleh lembaga pengguna yaitu lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah sesuai dengan bidang tugasnya, baik lembaga di tingkat pusat dan lembaga pengguna di daerah. Lembaga pengguna di daerah yaitu organisasi perangkat daerah/OPD, badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik, lembaga swadaya masyarakat maupun swasta. Data sangat diperlukan untuk menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang baik sebagai dasar penetapan target dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran.

Berkaitan dengan Indikator SDGs dalam penerapan teknologi dan inovasi, Perangkat Daerah berupaya memberikan nilai tambah kepada pengguna layanan, yaitu berupa nilai kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan. Selain itu, bagi masyarakat pengguna inovasi, efisiensi waktu dan kemudahan bisa meminimalkan terjadinya *opportunity lost* dalam beraktifitas. Nilai tambah dalam konteks inovasi tidak semua bisa diukur dengan angka, ini berbeda dengan nilai tambah yang sering digunakan dalam konteks ekonomi dan bisnis dimana mengukur nilai tambah bisa menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap produk yang dijual. Munculnya inovasi ini membuktikan adanya perkembangan yang positif di sektor publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (khususnya

pelayanan publik) yang memperhatikan penciptaan nilai publik. Hal ini menunjukkan telah terjadi adopsi pendekatan *network community governance* yang menempatkan masyarakat dalam posisi yang utama dalam pelayanan. Namun demikian, hal ini tidak menggeser atau menghilangkan pendekatan *traditional public administration* dan *new public management* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi selanjutnya bisa dijadikan cara untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor publik, baik yang berkaitan dengan perbaikan internal organisasi maupun perbaikan kualitas pelayanan publik. Data dosen perguruan tinggi di Kudus jumlah 624 dengan rincian : 1.UMK : 252, 2.UMKU : 174; 3.IAIN : 104; 4.Stikes Cendekia Utama : 48 ; 5.Politeknik Pemda : 18 6. Akbid Mardirahayu : 15; 7.Akbid Muslimat NU : 7; dan 8.Akper Krida Husada : 6.

Dosen sebagai peneliti telah menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi maupun internasional. Jumlah penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebanyak 856.473 terdiri laki-laki 427.243 dan perempuan 429.229. Jika diperbandingkan, maka persentase dosen dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Kudus sebesar 0,00073.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Adapun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Disebutkan pula bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Kabupaten Kudus masih harus disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin lama tingkat kompleksitasnya makin tinggi. Dengan hadirnya era globalisasi dan digitalisasi menyebabkan kebutuhan efektifitas perencanaan pembangunan semakin meningkat, hal ini menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan fungsi layanan urusan

pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah semakin akurat, valid, efektif, *up to date* dan akuntabel. sehingga proses Perencanaan yang diselenggarakan bisa menjadi arahan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Hal ini tidak saja menjadi tugas pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat untuk saling bersinergi mewujudkannya.

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus periode tahun 2019 s.d 2022 berjalan telah meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Akan tetapi masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Permasalahan utama yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus adalah Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, Belum optimalnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan,

Permasalahan pelayanan perangkat daerah tersebut dipetakan dalam masalah pokok, masalah serta akar masalah. Masalah pokok mengacu pada isu strategis perencanaan pembangunan daerah, merupakan akibat dari akar permasalahan yang harus diselesaikan dengan penyusunan arah kebijakan yang akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Permasalahan dipetakan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan Pemda
			Belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid. Baru 60 % data tersedia.
			belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
			belum optimalnya sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
			Belum optimalnya integrasi antar urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan
			Belum optimalnya kinerja sumberdaya yang dimiliki dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Belum seluruh indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pemda
2.	Belum optimalnya perumusan kebijakan berbasis kelitbangan	Baru 20 % tema prioritas kelitbangan yang disusun	Belum optimalnya Kerjasama dengan stakeholder terkait kelitbangan
			Rendahnya kompetensi SDM dalam penyusunan kegiatan kelitbangan
3.	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	Belum optimalnya pengelolaan SDM
			Belum optimalnya pengelolaan sarpras
			Belum optimalnya pengelolaan keuangan
			Belum optimalnya penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi prosedur kerja yang terstandar

Masalah Pokok perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan Perencanaan adalah masalah kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dikarenakan kualitas dokumen

perencanaan yang perlu ditingkatkan, dengan mencegah risiko terjadinya ketidakkonsistenan antar dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid, baru 60 % data tersedia. belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, belum optimalnya sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, belum optimalnya integrasi antar urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan, serta Belum optimalnya kinerja sumberdaya yang dimiliki dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Data pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan me Belum seluruh indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pemda.

Dalam urusan Penelitian dan pengembangan, masih didapatkan permasalahan belum optimalnya perumusan kebijakan berbasis kelitbangan baru 86%. Baru 20 % tema prioritas kelitbangan yang disusun, Belum optimalnya Kerjasama dengan stakeholder terkait kelitbangan, serta Rendahnya kompetensi SDM dalam penyusunan kegiatan kelitbangan, belum tersedia SDM yang mendapatkan pengembangan kompetensi dalam kelitbangan.

Pemecahan masalah melalui dilakukan melalui strategi. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Dari tabel tersebut diatas dijadikan acuan dalam penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program kegiatan.

3.1.2 Telaahan Renstra Kementerian, Renstra Propinsi dengan Kabupaten

3.1.2.1 Telaahan Renstra Kementerian

Menelaah Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.

Tabel 3.2. Kesesuaian Visi Kementerian dengan Tupoksi Perangkat Daerah

No.	Visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Tujuan Perangkat Daerah sesuai Misi dalam RPJMD	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
1.	<p>Visi : Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.</p> <p>Misi : 1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa 2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.</p> <p>Tujuan : 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia. 2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.</p> <p>Sasaran: 1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional. 2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional. 3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner. 4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.</p>	<p>Tujuan OPD: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.</p>	<p>Tugas Pokok OPD : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.</p>

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus.

Hasil penelaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 mencerminkan visi

bangsa dan agenda prioritas Nawacita Presiden Jokowi-JK, serta visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Kesesuaian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus terkait Tujuan / Visi Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ditampilkan pada tabel 3.2.

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka Visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandas, sudah selaras dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah di Kabupaten Kudus yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.1.2.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 mempunyai tugas pokok Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang perekonomian, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan, bidang riset dan pengembangan, bidang inovasi dan teknologi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah serta tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun fungsi yang terkait khususnya dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan adalah melaksanakan perumusan kebijakan, penataan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024-2026 adalah **“Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”**, dengan sasaran strategis daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Karena periode penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah sama dengan periode penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kudus, maka telaah dilakukan terhadap dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 dan akan disesuaikan jika dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2018 – 2023 adalah “Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas
2. Meningkatkan tata kelola organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Yang dimaksud mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*).

Agar tujuan strategis Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tersebut dapat tercapai, maka sasaran strategis terkait pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang hendak dicapai adalah;

1. Meningkatnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah;
2. Implementasi Kelitbangan Iptekin sesuai program pembangunan daerah.

Tabel 3.3 Telaahan Kesesuaian Tupoksi Perangkat Daerah dengan Misi Renstra Provinsi

No.	Tupoksi Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah sesuai Misi dalam RPJMD	Tujuan / Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi
1.	Tugas Pokok OPD : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.	Tujuan OPD: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Tujuan : 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas 2. Meningkatkan tata kelola organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah Sasaran : 1. Meningkatnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah; 2. Implementasi Kelitbangan Iptekin sesuai program pembangunan daerah.

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus.

3.1.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Sesuai dengan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyusunan RTRW kabupaten mengacu pada : rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kudus telah menetapkan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan : perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; rencana pembangunan jangka panjang daerah; rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten Kudus memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung

kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif; hak, kewajiban dan peran masyarakat; serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Oleh karena itu, RTRW disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara kawasan, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, penanganan kawasan perbatasan daerah, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi sistem kabupaten dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis kabupaten. Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Sesuai Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2010 tentang

Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kudus, Bappeda sebagai Sekretariat dan Ketua Pokja Perencanaan BKPRD Kabupaten Kudus, melakukan kegiatan koordinasi dengan OPD terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Selain itu Bappeda juga berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program perwujudan rencana struktur (jaringan transportasi, sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana pola ruang (kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawasan strategis kabupaten. Program pengembangan kawasan strategis kabupaten memerlukan dukungan Bappeda secara langsung disebabkan kawasan strategis merupakan kawasan yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka Pemerintah Daerah diarahkan untuk menyusun dokumen perencanaan salah satunya adalah Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Kabupaten.

Tujuan dari pembuatan KLHS Renstra OPD adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan Akhir Renstra OPD. Pembangunan berkelanjutan terdapat 17 target/tujuan, dimana tujuan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah adalah pada tujuan ke-16 yaitu:

Tujuan ke-16, Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level, yang diuraikan pada target tujuan ke 6; Membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level, dan target tujuan ke 7; Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua level. Mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut yang terkait dengan indikator tujuan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 telah mengakomodir indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagai indikator tujuan, serta Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, Indeks Inovasi Daerah, dan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah menjadi komponen perhitungan Indikator Kinerja Utama.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 juga telah mengacu pada Perencanaan tata ruang sebagai proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis Perangkat Daerah dipetakan sesuai dengan tingkatan isu internasional, nasional dan Daerah, untuk kemudian dirumuskan faktor penentu keberhasilan.

Tabel 3.4 (T-B.37) Keterkaitan Isu Strategis Internasional, Nasional, Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus.

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan kemiskinan serta kelaparan • Pendidikan dasar untuk semua kalangan • Mendorong kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan • Menurunkan angka kematian pada Anak • Meningkatkan kesehatan Ibu • Memerangi penyakit HIV/AIDs, malaria serta penyakit menular lainnya • Memastikan kelestarian lingkungan hidup • Membangun kemitraan global untuk pembangunan" 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengentasan pengangguran • Akses Pendidikan dasar • Peningkatan mutu SDM • Peningkatan Derajad Kesehatan • Peningkatan kesetarian Lingkungan • Kerjasama Luar negeri
2	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; • mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; • meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; • revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; • memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; • membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta • memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan • Pemerataan pembangunan • Peningkatan mutu SDM • Revolusi mental dan kebudayaan • Penguatan infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar • Ketahanan bencana • Stabilitas polhukhankam • Transformasi pelayanan publik.

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
3	Daerah	<p>Isu strategis Provinsi Jawa tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan Kemiskinan • Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM • Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha • Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam • Kedaulatan pangan dan energi • Kesenjangan wilayah • Tata Kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah <p>Isu strategis jangka panjang Kabupaten Kudus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang bermoral beretika dan berbudaya • Masyarakat religius yang toleran • Modernisasi dan berdaya saing • Meningkatkan kualitas SDM • Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan • Penyelenggaraan pemerintahan yang baik berkeadilan • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Peningkatan ketentraman dan ketertiban dan demokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pemerintahan yang baik berkeadilan • Peningkatan IPM • Penanggulangan kemiskinan • Pengentasan pengangguran • Pertumbuhan ekonomi

Isu strategis internasional tersebut merupakan jabaran MDGs yang menjadi referensi indikator capaian pembangunan internasional. Isu Strategis Nasional sebagai prioritas pembangunan nasional harus diwujudkan bersama dengan daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Isu strategis daerah menjadi acuan dalam penentuan faktor kunci keberhasilan untuk perumusan strategi dan arah kebijakan daerah. Isu strategis Daerah tahun 2024-2026 yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kesejahteraan SDM
2. Transformasi ekonomi yang berdaya saing
3. Birokrasi yang dinamis dan berintegritas
4. Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah.

Dari isu strategis tersebut disajikan keterkaitan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dengan Tujuan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kudus yaitu : Meningkatkan Daya Saing SDM; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Transformasi ekonomi yang berdaya saing; Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik; Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat. Tujuan pembangunan daerah kabupaten kudus perlu di dukung oleh seluruh perangkat daerah pengampu sesuai dengan bidang urusan. Berikut disajikan tabel keterkaitan Tujuan Pembangunan Daerah terhadap isu strategis perangkat daerah.

Tabel 3.5 (T-B.3.7) Keterkaitan Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026 dengan Isu Strategis Bappeda Kab. Kudus Tahun 2024-2026

No	Tujuan Pembangunan Daerah 2024-2026	Isu Strategis Bappeda 2024-2026	Isu Strategis Berkaitan Tugas Pokok Fungsi dan Urusan yang dilaksanakan Bappeda
1	Meningkatkan Daya Saing SDM	Tatakelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Birokrasi yang dinamis dan berintegritas	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan berbasis kelitbangan
3.	Transformasi ekonomi yang berdaya saing		<ul style="list-style-type: none"> • Birokrasi yang dinamis dan berintegritas
4	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik		
5.	Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat		

Dari isu strategis tersebut disajikan keterkaitan tujuan pembangunan dari tabel tersebut di atas disajikan bahwa Bappeda Kabupaten Kudus sesuai dengan tugas pokok fungsinya menjalankan urusan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah, berperan dalam mendukung tujuan mencapai terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dengan dukungan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah, meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus yang mencakup : Meningkatkan Daya Saing SDM; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Transformasi ekonomi yang berdaya saing; Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik; Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat harus diwujudkan dan dijabarkan mekasime struktur kinerja perangkat daerah. Bappeda Kabupaten Kudus sesuai dengan tugas pokok fungsinya menjalankan urusan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah, berperan dalam mendukung tujuan mencapai Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dengan dukungan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah, meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah dengan target capaian sebagaimana tersaji dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator Tujuan/Sasaran	Target Sasaran				
						2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi PD	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan daerah Pemda ditambah Tingkat Capaian Hasil Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi dua.	100 indeks	100 indeks	100 indeks	100 indeks	100 indeks
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh inspektorat	83 nilai	84 nilai	85 nilai	86 nilai	87 nilai
			Terwujudnya Perumusan kebijakan berbasis kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	Pengukuran skor indeks inovasi dari kemendagri	51,73 indeks	52 indeks	53 indeks	54 indeks	55 indeks

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kudus akan diukur capaian kinerjanya melalui indikator indeks Perencanaan Pembangunan, Nilai Sakip dan Indeks Inovasi Daerah.

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/ DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN/ ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi PD	Nilai hasil evaluasi RB oleh Inspektorat	Meningkatnya kualitas Perencanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Pemda ditambah Tingkat Capaian Hasil Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi dua	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah thd RPJMD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Pemda
							Meningkatkan ketersediaan data informasi yang valid		Tingkat Capaian hasil evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
								PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
									Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perkonomian dan SDA, Infrastruktrur dan Kewilayahan.

Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi PD	Nilai hasil evaluasi RB oleh Inspektorat	Terwujudnya perumusan kebijakan berbasis kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	Pengukuran skor indeks inovasi dari kemendagri	Peningkatan kerjasama penyelenggaraan kelitbangan dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait	Kerjasama penyusunan kajian/riset/ grand design dengan stakeholder dan perguruan tinggi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase kajian/riset/grand design yang diimplementasikan dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi PD	Nilai hasil evaluasi RB oleh Inspektorat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sestim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Optimalisasi Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya di tingkat PD	Optimalisasi pengelolaan SDM berorientasi merit sistem	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)
							Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset		
							Optimalisasi pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan		
							Optimalisasi pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan kerja terstandar		

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka Panjang Bappeda Kabupaten Kudus sesuai dengan tugas pokok fungsinya menjalankan urusan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah, berperan dalam mendukung tujuan mencapai Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dengan dukungan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah, meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah dijabarkan strategi dan arah kebijakan seperti ditampilkan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 (T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhadap RPJMD Meningkatkan ketersediaan data informasi yang valid
	Terwujudnya Perumusan Kebijakan Berbasis Kelitbangan	Peningkatan Kerjasama penyelenggaraan kelitbangan Perangkat Daerah dengan stakeholder dan perguruan tinggi	Kerjasama penyusunan kajian/riset/grand design dengan stakeholder dan perguruan tinggi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya di tingkat PD	Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit system
			Optimalisasi Pengelolaan sarana Prasarana sesuai standar manajemen aset
			Optimalisasi Pengelolaan Keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah
			Optimalisasi pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan kerja terstandar

Arah kebijakan dalam penentuan program dan kegiatan Perangkat daerah mencakup upaya untuk: Mewujudkan konsistensi antar dokumen

perencanaan Perangkat Daerah terhadap RPJMD; Meningkatkan ketersediaan data informasi yang valid; Kerjasama penyesuaian kajian/riset/grand design dengan stakeholder dan perguruan tinggi, Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit system, Optimalisasi Pengelolaan sarana Prasarana sesuai standar manajemen asset, Optimalisasi pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan kerja terstandar. Arah kebijakan ini dijadikan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahun 2024-2026.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA RENCANA
PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 ini merupakan serangkaian Langkah penjabaran dari kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan.

Untuk melaksanakan Arah kebijakan Perangkat daerah mencakup upaya untuk : Mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhadap RPJMD; Meningkatkan ketersediaan data informasi yang valid; Kerjasama penyesuaian kajian/riset/grand design dengan stakeholder dan perguruan tinggi, Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit system, Optimalisasi Pengelolaan sarana Prasarana sesuai standar manajemen asset, Optimalisasi pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan kerja terstandar, dirumuskan Program prioritas seperti ditampilkan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 Perumusan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kinerja Awal Perencanaan Tahun 2022		Target Kinerja			
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Pemda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat Capaian Hasil Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Kinerja Awal Perencanaan Tahun 2022		Target Kinerja			
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
			Tingkat Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Kerjasama Kerjasama kajian/riset/grand design dengan stakeholder dan perguruan tinggi	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase kajian/riset/grand design	**	**	20%	20%	20%	20%

Target kinerja ditetapkan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan target Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Pemda 100%, Tingkat Capaian Hasil Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100%, Tingkat Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100%, Tingkat Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan 100% dan Persentase kajian/riset/grand design. Program tersebut dirumuskan dalam Kegiatan dan sub kegiatan seperti ditampilkan pada tabel 6.2.

Tabel 6.2 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik																
	Meningkatnya kualitas Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan														
			5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH												
				Tingkat capaian hasil evaluasi Perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	165.000.000	100%	170.000.000	100%	200.000.000	100%	535.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus	
				Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah	100 %	100 %	2.450.696.000	100 %	2.197.566.000	100 %	2.429.472.000	100 %	7.077.734.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus	
			5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan daerah yang tersusun sesuai standart	100%	100%	1.960.696.000	100%	1.697.566.000	100%	1.905.000.000	100%	5.563.262.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	1.050.000.000	3 Dokumen	1.100.000.000	3 Dokumen	1.200.000.000	2 Dokumen	3.350.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	500 Usulan	500 Usulan	11.000.000	500 Usulan	12.000.000	500 Usulan	15.000.000	500 Usulan	38.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	509.696.000	1 Berita Acara	200.000.000	1 Berita Acara	250.000.000	1 Berita Acara	959.696.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	120.000.000	2 Berita Acara	120.000.000	2 Berita Acara	140.000.000	2 Berita Acara	380.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	270.000.000	4 Dokumen	265.566.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	835.566.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
			5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	60%	66%	490.000.000	67%	500.000.000	68%	524.472.000	68%	1.514.472.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4 Buku	4 Buku	490.000.000	4 Buku	500.000.000	4 Buku	524.472.000	4 Buku	1.514.472.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
							Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	100 %	100 %	165.000.000	100 %	170.000.000	100 %	200.000.000	100 %	535.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	165.000.000	3 Laporan	170.000.000	3 Laporan	200.000.000	3 Laporan	535.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
			5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
					Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemsosbud	100 %	100 %	460.000.000	100 %	480.000.000	100 %	500.000.000	100 %	1.440.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
					Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Praswileksda	100 %	100 %	370.000.000	100 %	400.000.000	100 %	480.000.000	100 %	1.250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
			5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Perangkat Daerah Pengampu Bidang Pemsosbud	100%	100%	460.000.000	100%	480.000.000	100%	500.000.000	100%	1.440.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	340.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	1.040.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen 120.000.000	1 Dokumen 130.000.000	1 Dokumen 150.000.000	1 Dokumen 400.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus				
			5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pengampu Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100% 230.000.000	100% 250.000.000	100% 280.000.000	100% 760.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus				
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen 120.000.000	2 Dokumen 130.000.000	2 Dokumen 150.000.000	2 Dokumen 400.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus				
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen 110.000.000	1 Dokumen 120.000.000	1 Dokumen 130.000.000	1 Dokumen 360.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus				
			5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah pengampu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100% 140.000.000	100% 150.000.000	100% 200.000.000	100% 490.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	490.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik																
	Meningkatnya Fungsi Kelitbang	Indeks Inovasi Daerah														
			5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
					Persentase hasil penelitian pengembangan dise minarkan/dipublikasikan	20 %	20 %	530.000.000	20 %	559.600.000	20 %	650.000.000	20 %	1.739.600.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
			5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase tema/masalah idang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar	0%	10%	100.000.000	10%	105.000.000	10%	120.000.000	10%	325.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	120.000.000	4 Laporan	325.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase tema/masalah Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar	0%	10%	100.000.000	10%	100.000.000	10%	110.000.000	10%	310.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DA Kab. Kudus ERAH	Kab. Kudus
				Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	4 Dokumen	310.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
			5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase tema/masalah Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar	20%	20%	100.000.000	20%	105.000.000	20%	120.000.000	20%	325.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	325.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
			5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase produk inovasi yang didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan HAKI	10%	15%	230.000.000	20%	249.600.000	25%	300.000.000	25%	779.600.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
							Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	2 Dokumen	230.000.000	2 Dokumen	249.600.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	779.600.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik PD																
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)														
			X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
					Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda)	47 Nilai	48 Nilai	7.800.395.000	49 Nilai	8.322.027.000	50 Nilai	9.016.746.000	50 Nilai	25.139.168.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	14.000.000	100%	16.000.000	100%	22.000.000	100%	52.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	7.000.000	6 Laporan	8.000.000	6 Laporan	11.000.000	6 Laporan	26.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	7.000.000	9 Dokumen	8.000.000	9 Dokumen	11.000.000	9 Dokumen	26.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	80%	85%	5.711.395.000	90%	6.044.127.000	90%	6.285.846.000	90%	18.041.368.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	6.000.000	8 Dokumen	6.200.000	8 Dokumen	6.600.000	8 Dokumen	18.800.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	7 Dokumen	80.000.000	7 Dokumen	83.000.000	7 Dokumen	85.000.000	7 Dokumen	248.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5.625.395.000	36 Orang/bulan	5.954.927.000	36 Orang/bulan	6.194.246.000	36 Orang/bulan	17.774.568.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
			X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	70%	70%	760.000.000	70%	795.000.000	70%	940.000.000	70%	2.495.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	700.000.000	50 Orang	720.000.000	50 Orang	850.000.000	50 Orang	2.270.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
							Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	60.000.000	6 Orang	75.000.000	6 Orang	90.000.000	6 Orang	225.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
			X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pengukung perkantoran yang sesuai standar	100%	100%	637.000.000	100%	707.800.000	100%	902.200.000	100%	2.247.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	280.000.000	30 Laporan	332.700.000	30 Laporan	366.000.000	30 Laporan	978.700.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000	2 Dokumen	10.100.000	2 Dokumen	11.100.000	2 Dokumen	30.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	20.000.000	5 Paket	20.500.000	5 Paket	22.600.000	5 Paket	63.100.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	60.000.000	10 Paket	65.000.000	10 Paket	70.000.000	10 Paket	195.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	20.000.000	8 Paket	20.500.000	8 Paket	22.600.000	8 Paket	63.100.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	240.000.000	45 Paket	250.000.000	45 Paket	400.000.000	45 Paket	890.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	8.000.000	7 Paket	9.000.000	7 Paket	9.900.000	7 Paket	26.900.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
			X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	556.830.000	100%	190.000.000	100%	330.000.000	100%	1.076.830.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 unit	11 unit	11.685.000	11 unit	15.000.000	11 unit	20.000.000	11 unit	46.685.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	8 unit	145.145.000	8 unit	175.000.000	8 unit	310.000.000	8 unit	630.145.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	400.000.000	-	-	-	-	1 unit	400.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%	100%	363.000.000	100%	412.400.000	100%	476.900.000	100%	1.252.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	270.000.000	8 Laporan	300.000.000	8 Laporan	353.200.000	8 Laporan	923.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	93.000.000	3 Laporan	112.400.000	3 Laporan	123.700.000	3 Laporan	329.100.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
			X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	100%	315.000.000	100%	346.700.000	100%	389.800.000	100%	1.051.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	25.000.000	5 Unit	25.000.000	5 Unit	26.000.000	5 Unit	76.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	7.000.000	1 Unit	7.200.000	1 Unit	7.900.000	1 Unit	22.100.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	13.000.000	10 Unit	14.500.000	10 Unit	15.900.000	10 Unit	43.400.000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	270.000.000	30 Unit	300.000.000	30 Unit	340.000.000	30 Unit	910.000.000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Kudus
TOTAL ANGGARAN								11.776.091.000		12.129.193.000		13.276.218.000		37.181.502.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Rumusan IKU Perangkat Daerah Beserta Indikator Dan Target

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel 7.1.

Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Perencanaan Daerah	100 indeks	100 indeks	100 indeks	100 indeks	100 indeks
2.	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	84 nilai	85 nilai	86 nilai	87 nilai	87 nilai
3.	Indeks Inovasi Daerah	51,73 indeks	52 indeks	53 indeks	54 indeks	55 indeks

7.2 Rumusan IKK Perangkat Daerah Beserta Indikator dan Target

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah yang di ampu oleh Bappeda Kabupaten Kudus.

Tabel 7.2 (T-C.28) Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>INDIKATOR TUJUAN PD</u>					
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	81	82	83	85	85
	<u>INDIKATOR SASARAN PD</u>					
1.	Indeks Perencanaan Daerah	100	100	100	100	100
2.	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	84	85	86	87	87
3.	Indeks inovasi daerah	20	20	20	20	20
	<u>INDIKATOR PROGRAM</u>					
1.	Tingkat capaian hasil evaluasi Perencanaan Pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemsosbud	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Praswileksda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/ dipublikasikan	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
6.	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda)	47 Nilai	48 Nilai	49 Nilai	50 Nilai	50 Nilai
	<u>INDIKATOR KEGIATAN</u>					
1.	Persentase dokumen perencanaan daerah yang tersusun sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	60%	66%	67%	68%	68%
3.	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Perangkat Daerah Pengampu Bidang Pemsosbud	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pengampu Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
6.	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah pengampu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase tema/masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar	0%	10%	10%	10%	10%
8.	Persentase tema/masalah Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar	0%	10%	10%	10%	10%
9.	Persentase tema/masalah Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar	20%	20%	20%	20%	20%
10.	Persentase produk inovasi yang didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan HAKI	10%	15%	20%	25%	25%
11.	Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	80%	85%	90%	90%	90%
13.	Persentase ASN PD yang memenuhi 20JP pertahun	70%	70%	70%	70%	70%
14.	Cakupan layanan pengukung perkantoran yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kudus menjadi acuan penilaian kinerja terhadap capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan.

BAB VIII PENUTUP

8.1 Catatan Penting

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk tiga tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan memperhitungkan potensi dan kemampuan yang ada.

Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan antara lain:

1. Memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.
2. Mengupayakan potensi yang dimiliki baik sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah; serta
3. Mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada perangkat daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada perangkat daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama dengan baik;
3. Renstra perangkat dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 3 tahun. Untuk menjaga konsistensi dan

keselarasan kebijakan program dan kegiatan maka penyusunan Renja perangkat daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra perangkat daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra perangkat daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


8.3 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 adalah: Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; Melakukan upaya peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah; dan Melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan melaksanakan program kegiatan yang dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2024, 2025 dan Tahun 2026.

Demikian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ini dengan harapan dapat Tujuan Pembangunan Daerah.

Kudus, 11 April 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS


Drs. REVLISIANTO SUBEKTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660321 198603 1 006